



Pranatan Anyar



DISIAPKAN, RS KHUSUS COVID-19

Gugus Tugas Kalurahan Dikuatkan

KULONPROGO (KR) - Tim Satuan Tugas Covid-19 Tingkat Kalurahan akan dikuatkan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo, untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang terus meningkat penambahannya hariannya, meski sudah dilakukan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 11 Januari 2021.

"Pelaksanaan PPKM di Kulonprogo berbanding terbalik dengan penambahan kasus harian. Karena kebijakan PPKM bersifat dari atas ke bawah dan belum tentu pas dengan kondisi tiap wilayah. Dicontohkan di Kulonprogo malam hari saja tidak ada PPKM relatif sepi, sehingga tak terlalu berdampak dengan penambahan jumlah kasus positif," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kulonprogo Fajar Gegana, Rabu (3/2).

Menurutnya, permasalahan saat ini ada di kalurahan-kalurahan, masyarakat masih banyak yang berkumpul tidak taat protokol kesehatan (prokes). Karena itu perlu penguatan di tingkat kalurahan. Tim Satgas Covid-19 di setiap kalurahan harus

diperkuat guna pendampingan dan pengawasan ketat di tingkat bawah. Tentu ini berkaitan anggaran, maka perlu regulasi yang mengatur agar Tim Satgas di Tingkat Kalurahan dioptimalkan," ucap Fajar.

Selama PPKM tahap pertama (11-25 Januari) penambahan kasus cukup tinggi sebanyak 569 kasus. Sedangkan awal pemberlakuan PPKM tahap kedua, mulai 26 Januari hingga 8 Februari, hingga 2 Februari sudah mencapai 275 kasus. "Tingginya kasus karena sudah terjadi transmisi lokal, lebih disebabkan kluster keluarga dan perkantoran," ucap Fajar.

Sementara itu Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karanganyar mengecek kesiapan empat rumah sakit swasta dalam menangani pasien Covid-19. Kesiapan penanganan menjadi modal menjajaki kerja sama pembuatan rumah sakit khusus pasien Covid-19. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Karanganyar Juliyatmono mengatakan, empat RS swasta itu adalah RS PKU Muhammadiyah, RS Indosehata, RSU Jati Husada dan RS dr Siswanto Lanud Adi Soemarmo. (Wid/Lim)-f

PEMERINTAH LIBATKAN BERBAGAI UNSUR

Posko Tangguh Covid-19 Hingga RT/RW

JAKARTA (KR) - Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 membentuk Pos Komando (Posko) Desa/Kalurahan Tangguh Covid-19 yang akan menerjunkan petugas untuk penanganan Covid-19 hingga level mikro yaitu RT/RW, desa, kampung, banjar, atau nagari.

"Sebagai bentuk respons dari arahan Pak Presiden, telah dilakukan rapat koordinasi Satgas Covid-19 dengan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia beserta pejabat kementerian/lembaga terkait mengenai Desa Tangguh Covid-19 dan pembentukan Posko Tangguh Covid-19 di kalurahan, desa, kecamatan," kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang dipantau di Jakarta, Rabu (3/2).

Wiku Adisasmito mengatakan, langkah ini merupakan upaya penguatan penanganan Covid-19 di level pusat dan daerah yang didesentralisasi di tingkat mikro desa dan kalurahan.

Wiku menjelaskan, Posko Tangguh Covid-19 di level kalurahan dan desa ini terdiri unsur TNI-Polri, Pemerintah Daerah seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perencanaan, Puskesmas, PKK, serta tokoh masyarakat dan pemuka agama. Urgensi pembentukan Posko Tangguh Covid-19 seiring meningkatnya kasus Covid-19 dan perilaku kepatuhan masyarakat yang belum terbentuk secara optimal.

Secara operasional, fungsi dari tugas prioritas Posko Tangguh Covid-19 mencakup mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan, layan-

an masyarakat, kendali informasi, serta pelaksanaan 3T yaitu *testing, tracing, treatment* atau pengetesan, pelacakan kontak erat, serta perawatan atau isolasi mandiri pasien Covid-19.

"Prinsipnya Posko berfungsi untuk mempermudah proses perubahan perilaku, peningkatan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pemulihan ekonomi," jelas Wiku.

Posko merupakan sebuah lokasi atau tempat yang dijadikan pusat komando dalam operasi penanganan Covid-19 yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, dan mengeksekusi penanganan Covid-19.

Struktur organisasi Posko Tangguh Covid-19 terdiri kepala desa atau lurah sebagai ketua, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil dan beranggotakan perangkat desa dan elemen masyarakat lainnya. (Ant)-f

RT/RW Tingkatkan Pengawasan Mobilitas Warga

YOGYA (KR) - Efektivitas kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) belum bisa dikatakan maksimal. Kendati demikian, penegakan protokol kesehatan (prokes) serta beberapa poin dalam PTKM harus tetap dilaksanakan secara disiplin. Hanya dengan cara tersebut penularan atau penambahan kasus positif Covid-19 diharapkan bisa dikendalikan dengan baik.

"Kebijakan PTKM ini tidak hanya diberlakukan di DIY, tapi juga beberapa daerah lain di Jawa dan Bali. Meski hasilnya belum bisa dikatakan maksimal, DIY terus berusaha melaksanakan PTKM sebaik-baiknya. Salah satunya dengan meminta RT/RW untuk meningkatkan pengawasan terhadap mobilitas warganya," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, Rabu (3/2).



KR-Riyana Ekawati
Noviar Rahmad

Noviar mengatakan, karantina di tingkat RT/RW sangat penting, karena mereka lebih mengetahui kondisi di lapangan. Khususnya dalam melakukan pengawasan bagi mereka yang terkonfirmasi positif. Dengan begitu penanganan dan pengawasan bisa maksimal, dengan tetap disertai kedisiplinan melaksanakan prokes seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta, menghilangkan faktor pemicu menjadi kunci utama dalam menekan kasus positif Covid-19. Tidak terbatas sedang masa pembatasan atau tidak. Pasalnya, kebijakan PTKM muncul karena terjadi penularan tinggi.

"Ketika ada faktor pemicu penularan Covid-19, maka penularannya akan terjadi kecepatan sangat tinggi," ujarnya. (Ria/Ira/Awh)-f

Disiplin Prokes, Kunci Bisa Umrah

TEMANGGUNG (KR) - Disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) menjadi kunci umat muslim Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Pasalnya, penerapan prokes dapat mencegah penularan Covid-19, sehingga kasusnya terus menurun dan terkendali.

"Jika kasus Covid-19 di Indonesia terus menurun dengan penerapan prokes, sementara imunisasi Covid-19 berjalan, Insha Allah Arab Saudi akan menerima jemaah umrah dan haji dari Indonesia," kata Kepala Kantor Kementerian Agama Temanggung Ahmad Muhdzir di sela pemberian bantuan Alquran dan panduan salat lengkap pada SD se-Kabupaten Temanggung dari Baznas setempat, Rabu (3/2).

Ahmad Muhdzir mengatakan, menjadi angin segar dengan dibukanya ibadah umrah dan penambahan usia dari 50 menjadi 60 tahun. Minat warga beribadah kembali bergairah, hingga kemudian Indonesia masuk dalam 20 negara yang dilarang masuk ke Arab Saudi. Salah satu penyebabnya, terkait Covid-19.

"Karena itu, kami dari Kementerian Agama terus gencarkan sosialisasi untuk disiplin penerapan prokes guna pengendalian penularan Covid-19," katanya.

Ahmad Muhdzir mengatakan, berdasarkan catatan ada sekitar 30 warga yang meminta surat rekomendasi untuk ibadah umrah. Sampai saat ini belum ada informasi dari biro perjalanan ibadah umrah atau dari warga yang kemarin meminta surat tersebut. (Osy)-f

PLN PERPANJANG STIMULUS DAMPAK PANDEMI DIY

1,3 Juta Pelanggan Nikmati Listrik Subsidi

YOGYA (KR) - PT PLN (Persero) kembali memperpanjang waktu stimulus untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 berupa program pemberian listrik gratis dan bantuan keringanan biaya listrik atau subsidi hingga 31 Maret 2021. Stimulus untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 yang digulirkan PLN tersebut dapat dinikmati setidaknya sebanyak 1.309.877 pelanggan di DIY.

Humas PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta Rina Wijayanti mengatakan pihaknya melaksanakan kebijakan perpanjangan subsidi dan listrik gratis sampai akhir Maret 2021 sesuai dengan arahan pusat. Jumlah pelanggan di DIY yang dapat menikmati kedua program stimulus untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 berdasarkan data mencapai 1.309.877 pelanggan per 31 Desember 2020.

"Pelanggan yang dapat stimulus

dampak pandemi di DIY yaitu sebanyak 452.468 pelanggan Rumah Tangga yang menikmati listrik gratis dengan daya 450 Volt Ampere (VA). Sedangkan sebanyak 124.401 pelanggan daya 900 VA tarif Rumah Tangga menerima subsidi atau diskon biaya tagihan listrik sebesar 50 persen," tutur Rina kepada KR di Yogyakarta, Rabu (3/2).

Rina menjelaskan perbedaan mekanisme terdapat dalam pemberian stimulus keringanan tagihan listrik antara triwulan pertama tahun ini

dengan tahun lalu. Pelanggan pas-cabayar pada 2020 semua pemakaian tarifnya mendapatkan diskon 100 persen bagi pelanggan daya 450 VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan daya 900 VA subsidi.

"Namun tahun ini, pemakaian yang didiskon adalah yang maksimal dengan 720 jam nyala. Pemakaian di atas waktu tersebut dikenakan tarif normal subsidi," tandasnya.

Sementara itu, Rina menyampaikan relaksasi pelanggan tarif sosial, bisnis dan industri tidak mengalami perubahan mekanisme. Sebelumnya, pelanggan prabayar daya 450 VA diberikan token gratis sebesar pemakaian tertinggi Desember 2019 hingga Februari 2020. Program token listrik gratis 2021 merupakan bagian dari stimulus PLN serta diskon 50 persen listrik dapat diakses pada Februari 2021 ini. (Ira)-f



KR-Surya Adi Lesmana
SEPAKBOLA DI KEBEN: Sejumlah anak bermain sepakbola di kompleks Keben Kraton Yogyakarta, Rabu (3/2). Memanfaatkan tak adanya wisatawan di sore hari, Keben dimanfaatkan sejumlah pihak untuk berkegiatan olahraga yang bertujuan menjaga imun tubuh seperti sepakbola hingga 'skate board'.

AKTIVITAS GUNUNG MERAPI

Lava Pijar Masih Terus Muncul

YOGYA (KR) - Gunung Merapi pada Rabu (3/2) periode pukul 00.00-06.00 WIB mengeluarkan empat kali guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimum 900 meter ke arah barat daya, hulu Kali Krasak dan Boyong. Pada periode tersebut, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) juga mencatat terjadi 16 kali gempa guguran dan 1 kali hembusan.

Sedangkan sehari sebelumnya, Selasa (2/2) pukul 00.00-24.00 WIB, BPPTKG mencatat terjadi 10 kali meluncurnya guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimum 800 meter ke arah barat daya dengan deformasi yang terukur dari Pos Babadan rata-rata 0,3 cm per hari dalam tiga hari.

Menanggapi berita di media sosial yang menyatakan bahwa terdapat kubah lava baru di lereng Gunung Merapi, Kepala BPPTKG Hanik Humaida menegaskan bahwa material (gundukan) hitam yang terlihat bukan kubah lava baru. "Berdasarkan hasil observasi, material tersebut terlihat tidak berpijar, tidak teramati adanya asap di material tersebut, serta tidak terdapat rekahan di sekeliling material. Kami simpulkan material tersebut adalah material vulkanik yang terbawa oleh aliran awan panas guguran," ujarnya.

Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi aktivitas Gunung Merapi dari sumber yang terpercaya. Untuk informasi resmi aktivitas Gunung Merapi masyarakat dapat mengakses informasi melalui Pos Pengamatan Gunung Merapi terdekat, radio komunikasi pada frekuensi 165.075 MHz, website merapi.bgl.esdm.go.id, media sosial BPPTKG. (Dev)-f

TEMUAN AWAL KNKT SOAL SJ-182

Pesawat Tidak Pecah di Udara

JAKARTA (KR) - Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono membantah bahwa pesawat Sriwijaya Air SJ-182 mengalami *full stall* seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial seperti YouTube.

"Ada dua media sosial yang mengatakan ada kejanggalaan pada pukul 07.40 UTC (14.40 WIB) pesawat Boeing 737 dengan kecepatan 115 knot secara teoretikal itu sudah *stall* jadi *moment of truth* pesawat ini sudah *stall*. Hal ini tidak benar," kata Soerjanto dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (3/2).

Selain itu, pernyataan lain di medsos menyebutkan, berdasarkan *ground speed* 115 knots ini indikasi keras pesawat terkena *full stall* dan akan sulit *discover* dengan ketinggian seperti itu.

Soerjanto menjelaskan, data kotak hitam *Flight Data Recorder* (FDR) menunjukkan sejak ketinggian berkurang, kecepatan pesawat bertambah, sedangkan kecepatan 115 knot di data *flightradar24* merupakan *ground speed*.

Temuan awal, kata Soerjanto, menunjukkan puing pesawat tipe Boeing 737-500 tersebut di lebar 80 meter, panjang 110 meter kedalaman 16-23 meter dimana be-

berapa bagian mewakili seluruh bagian di depan hingga belakang. "Pesawat ini tidak mengalami ledakan sebelum membentur air. Pesawat secara utuh membentur air, tidak ada pecah di udara," ujarnya.

Selain itu, lanjut Soerjanto, mesin di turbin masih dalam keadaan hidup, kondisinya rontok ada indikasi masih berputar ketika membentur air.

KNKT telah mengunduh data kotak hitam FDR Sriwijaya Air SJ-182 sejak ditemukan pada 13 Januari 2021. Terdapat 370 parameter dan semua dalam kondisi baik. Sebelum pengunduhan data, perlu ada perlakuan (*treatment*) khusus yang harus dilakukan.

KNKT menyatakan, sistem pesawat Sriwijaya Air SJ-182 masih berfungsi dan mampu mengirim data sebelum jatuhnya di Perairan Kepulauan Seribu pada Senin (9/1) pukul 14.40 WIB. KNKT telah mengumpulkan data radar ADS-B dari Perum Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Ainav Indonesia).

Dari data tersebut, tercatat pesawat mengudara pada pukul 14.36 WIB, terbang menuju arah Barat Laut dan pada pukul 14.40 WIB pesawat mencapai ketinggian 10.900 kaki. (Ant/Imd)-f

SKB 3 Menteri Atur Seragam Sekolah

JAKARTA (KR) - Surat keputusan bersama (SKB) mengenai seragam sekolah telah ditandatangani tiga menteri, Rabu (3/2) petang di Jakarta. Tiga menteri itu, yakni Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

SKB tersebut tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemda pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. "Ada tiga pertimbangan penyusunan SKB ini mengenai penggunaan seragam sekolah," ujar Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.

Tiga pertimbangan tersebut adalah sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, sekolah berperan dan bertanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara dan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pemda merupakan suatu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

Keputusan bersama itu mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemda. "Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama dan seragam serta atribut dengan kekhususan agama," katanya.

Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. (Ati)-f